BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada KPP Pratama Bojonagara, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk intensifikasi yang telah dilaksanakan pada KPP Pratama Bojonagara adalah pekan panutan, operasi sisir, surat himbauan, dan penagihan aktif
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis wilcoxon terhadap 6 hipotesis adalah sebagai berikut:
 1. Ada peningkatan significant STTS yang dianggarkan setelah intensifikasi perpajakan.
 2. Ada peningkatan significant SPPT sesudah intensifikasi perpajakan.
 3. Tidak ada peningkatan significant STTS dibayar sesudah intensifikasi perpajakan.
 4. Ada peningkatan significant penerimaan PBB sesudah intensifikasi perpajakan.
 5. Tidak ada peningkatan significant STTS yang menunggak sesudah intensifikasi perpajakan.
 6. Tidak ada peningkatan significant penerimaan PBB yang menunggak sesudah intensifikasi perpajakan

Hasil hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa, terdapat peranan intensifikasi perpajakan terhadap penerimaan PBB, hal ini dilihat dari peningkatan STTS yang dianggarkan, Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak, penerimaan PBB, penurunan STTS yang menunggak, dan penurunan PBB yang menunggak.

3. Menurut perhitungan yang peneliti lakukan dari data penerimaan peranan setelah dilakukan intensifikasi perpajakan adalah sebagai berikut peranan intensifikasi perpajakan dapat dilihat dengan menggunakan cara manual yaitu jumlah STTS dibayar yaitu sebesar 7,97 %, penerimaan PBB Sebesar 43,79%, penurunan STTS yang menunggak sebesar -6,35%, penurunan penerimaan PBB yang menunggak yaitu sebesar -8,40%

5.2 Saran

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mencoba memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi KPP Pratama Bojonagara dalam meningkatkan penerimaan pajaknya dimasa yang akan datang peneli, adalah :

1. Sebaiknya KPP Bojonagara mempunyai seksi intensifikasi khusus untuk menangani penagihan PBB
2. Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak oleh aparat pemerintah daerah hendaknya dapat diciptakan suasana yang sehat dan kekeluargaan antara aparat dengan masyarakat agar pengertian dan pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.